

REPRESENTASI KESENJANGAN SOSIAL TERHADAP PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN : STUDI KASUS PADA KOMUNITAS WARIA DI TULUNGAGUNG

Fika Yuni Atika

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

fikhayuni26@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kesenjangan sosial dalam akses pendidikan dan kesempatan kerja pada komunitas waria di Tulungagung, serta peran komunitas APRIKOT (Apresiasi Waria dan Priawan Kota Tulungagung) dalam mendukung pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi anggotanya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus melalui wawancara mendalam pada tiga informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10% waria di Tulungagung berpendidikan sarjana dan terbilang sejahtera namun sebanyak 90% hanya lulusan SD–SMA. Hal ini dikarenakan adanya diskriminasi, tekanan psikologis, serta kurangnya dukungan keluarga. Temuan ini memperlihatkan bahwa diskriminasi berbasis identitas gender menjadi hambatan utama dalam perkembangan modal manusia (human capital) kelompok waria, sebagaimana dijelaskan oleh Gary Becker bahwa investasi pendidikan semestinya berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas, namun tidak berlaku optimal bagi kelompok waria karena stigma sosial yang melekat. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa komunitas APRIKOT memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan sosial, pelatihan keterampilan, akses informasi pekerjaan, serta wadah pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup anggotanya. Secara keseluruhan, studi ini menekankan perlunya dukungan struktural yang lebih inklusif agar waria memperoleh akses pendidikan dan pekerjaan yang setara, serta dapat keluar dari lingkaran kesenjangan sosial-ekonomi.

Kata kunci : waria, pendidikan, pekerjaan, human capital, APRIKOT Tulungagung.

PENDAHULUAN

Waria adalah istilah yang secara kultural khas Indonesia, digunakan untuk menyebut individu yang secara biologis terlahir sebagai laki-laki, namun mengidentifikasi dan mengekspresikan dirinya sebagai perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari penampilan fisik hingga perilaku sosial. (Ashari, 2021) Secara sosiologis, waria bukan hanya sekadar persoalan penampilan, melainkan juga berkaitan erat dengan bagaimana seseorang memaknai dirinya di tengah norma dan ekspektasi masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia keberadaan waria bukanlah hal baru, kelompok ini telah lama menjadi bagian dari dinamika sosial. Meskipun kelompok mereka seringkali dipinggirkan dengan sistem sosial yang lebih dominan. (Tanjung, 2020)

Realitas sosial di Indonesia yang menunjukkan bahwa individu dengan identitas gender non-konvensional masih menghadapi hambatan struktural yang serius. Hal ini dapat berdampak pada perkembangan psikologis dan sosialnya, yang merasa tidak diterima atau tidak memiliki tempat dalam

struktur sosial yang ada.(Vahsyeli, Yusraini, & Lidya, 2020) Ketika seseorang seperti waria tidak memperoleh pengakuan atas identitas dirinya, mereka cenderung mengalami tekanan batin, rasa rendah diri, hingga kecemasan sosial. Keadaan juga diperparah dengan minimnya dukungan dari keluarga, lingkungan pendidikan, serta masyarakat luas. Mereka sering kali dianggap sebagai “penyimpang” atau “masalah moral”, bukan sebagai individu yang memiliki hak dan martabat yang sama. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kepercayaan diri mereka melainkan juga menghambat proses pengembangan diri, baik secara pendidikan maupun ekonomi.

Status sosial-ekonomi kelompok waria secara umum dapat dibagi ke dalam dua kategori utama, yakni mereka yang bekerja dalam sektor prostitusi dan mereka yang tidak. Waria non-pekerja seks umumnya mencari penghidupan melalui pekerjaan di sektor informal seperti menjadi penata rias di salon kecantikan, berdagang kecil-kecilan, mengamen, menjadi penyanyi di kafe atau klub malam, serta pekerjaan serabutan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, waria dituntut untuk membentuk identitas sosial yang berbeda dari konstruksi laki-laki maupun perempuan.(Nurusshalikhah, 2016) Mereka berada pada posisi yang ambivalen, bukan sepenuhnya diterima sebagai perempuan, dan tidak diakui lagi sebagai laki-laki. Identitas ini sering kali memunculkan berbagai risiko sosial, mulai dari ejekan, stigma, hingga penolakan dari lingkungan sekitar.(Lestari, Apip, & Hikmawan, 2018)

Terdapat faktor lain yang mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi seorang waria yakni dari latarbelakang pendidikannya. Di Indonesia, peran pendidikan dalam kehidupan waria masih menjadi perdebatan. Hal ini terlihat dari masyarakat yang selalu mendiskriminasinya. Banyak pihak meyakini bahwa pendidikan yang tinggi dapat membuka peluang kerja yang lebih baik dan membantu waria keluar dari lingkaran diskriminasi ekonomi. Sedangkan waria yang status pendidikannya rendah akan sulit mendapatkan peluang kerja yang formal dan menawarkan stabilitas serta perlindungan hukum. Fakta lain menunjukkan, masih banyak kasus dimana waria dengan latar pendidikan yang cukup tinggi tetap mengalami hambatan dalam memperoleh pekerjaan formal. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan saja tidak selalu cukup untuk mengatasi diskriminasi yang berbasis pada identitas gender.

Hal ini juga diungkapkan melalui studi kasus dari hasil penelitian Novita Ashari dimana seorang waria yang berstatus sebagai mahasiswa ini dapat bekerja dalam sektor pariwisata. Meskipun demikian, keberadaan mereka dalam lingkup pekerjaan juga mendapat stigma negatif. Berbeda dengan hasil penelitian dari Muhamad Zainal yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa waria yang berpendidikan rendah dikarenakan tidak adanya biaya untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, sehingga mereka beralih profesi sebagai penata rias, penyanyi, penjahit dll.(Ashari, 2021) Profesi ini terbilang mendominasi dikalangan waria, sebab mereka merasa dapat mengekspresikan dirinya. Namun juga terdapat hasil penelitian Dari Muhammad Ramadhana yang menemukan bahwa terdapat beberapa waria yang memutuskan menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial). Pada profesi PSK ini dianggap sebagai pelarian dari cara mereka bertahan hidup ditengah tekanan masyarakat.(Alfaris, 2018)

Meskipun demikian, banyak waria yang berhasil membentuk komunitas solidaritas dan menciptakan ruang aman untuk saling mendukung, seperti yang dilakukan melalui organisasi-organisasi lokal, termasuk APRIKOT (Apresiasi Waria dan Priawan Kota Tulungagung) yang dipimpin oleh Jossie Wilson.(Pamungkas, B., 2021) Komunitas inipun juga telah dalam naungan KPA (Komisi Penanggulangan AIDS). Sebagai Ketua Aprikot, Jossie Wilson tidak hanya menjadi representasi suara

komunitas waria, tetapi juga agen advokasi yang konsisten mendorong inklusi sosial dan perlindungan hak bagi kelompok marginal. Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang dikenal dengan kehidupan sosial budayanya yang dinamis, namun pada saat yang sama masih menyimpan tantangan dalam menerima keberagaman identitas gender. Meskipun sebagian masyarakat menunjukkan keterbukaan terhadap perbedaan, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya diskriminasi bagi waria.

Perdebatan terkait peran pendidikan dalam menentukan peluang kerja bagi waria menjadi isu yang kompleks. Sebab Tulungagung menjadi wilayah yang secara sosiokultural memiliki dinamika masyarakat yang unik, di mana tradisi dan nilai-nilai konservatif masih cukup kuat, namun pada saat yang sama juga menyediakan ruang ekspresi bagi kelompok waria untuk mengekspresikan diri. Dalam konteks ini, pendidikan sering dianggap sebagai alat penting untuk membuka akses terhadap pekerjaan yang layak, namun kenyataan menunjukkan sebaliknya. Masih terdapat bias struktural yang menghambat partisipasi waria dalam dunia kerja formal. Stigma sosial dan diskriminasi berbasis gender non-normatif menjadi tantangan yang kerap kali tidak terselesaikan hanya melalui jalur pendidikan. (Ashari, 2021) Oleh karena itu, studi mengenai hubungan antara pendidikan dan pekerjaan bagi komunitas waria di Tulungagung penting untuk dilakukan guna melihat bagaimana struktur sosial mempengaruhi mobilitas ekonomi mereka serta bagaimana mereka mengelola identitas dan keterbatasan yang ada untuk bertahan dalam realitas sosial yang tidak selalu ramah.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan menggunakan metode kualitatif. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana ketimpangan sosial-ekonomi terjadi dalam kehidupan sehari-hari waria di Tulungagung, serta bagaimana mereka merespons realitas tersebut melalui jaringan sosial dan solidaritas komunitas. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu. Data primer yang bersumber dari kata-kata, perilaku, dan tindakan para informan yang terlibat langsung dalam realitas yang diteliti. Sehingga peneliti akan melakukan interaksi langsung dengan informan yang memiliki pengalaman dan keterlibatan langsung dalam kehidupan komunitas waria di Tulungagung. Data sekunder, data ini dapat berupa laporan, buku, artikel, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi yang memberikan informasi tambahan dan mendukung analisis peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Organisasi APRIKOT di Tulungagung

Organisasi APRIKOT (Aliansi Perempuan dan Komunitas Transpuan) merupakan sebuah komunitas berbasis akar rumput (grassroot) yang secara khusus menaungi kelompok waria dan transpuan di wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Keberadaan organisasi ini memiliki peran strategis dalam memperjuangkan kesetaraan hak serta memberikan ruang aman bagi kelompok yang selama ini masih mengalami diskriminasi, baik secara sosial, ekonomi, maupun struktural. Organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpul dan berbagi pengalaman antar sesama anggota, tetapi juga berperan aktif dalam peningkatan kapasitas anggotanya melalui program-program pemberdayaan. Kegiatan yang dilakukan APRIKOT antara lain adalah

pelatihan keterampilan (seperti tata rias, menjahit, dan kewirausahaan), penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS, serta advokasi terhadap kebijakan publik yang lebih inklusif terhadap kelompok waria.

- B.** Organisasi APRIKOT juga menjalin kerjasama dengan sejumlah lembaga, baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah (NGO), untuk memperluas akses pelayanan yang dapat dinikmati oleh anggotanya. Bentuk kemitraan ini meliputi kerja sama dalam bidang layanan kesehatan, bantuan hukum, dan pengembangan kapasitas organisasi. Dengan pendekatan kolektif yang bersifat partisipatif, APRIKOT berupaya menghapus stigma serta membangun citra positif tentang komunitas waria di mata masyarakat yang konservatif. Dalam praktiknya pun, APRIKOT juga kerap menjadi tempat perlindungan sementara bagi anggota yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran, ataupun pengusiran dari keluarga. Dengan demikian, organisasi ini memainkan peran penting sebagai penyambung solidaritas sosial di antara para anggotanya dan sebagai sarana untuk membangun identitas sosial yang lebih kuat di tengah tekanan norma masyarakat yang cenderung heteronormatif.

C. Bentuk Kesenjangan Sosial dalam Pendidikan dan Pekerjaan Komunitas Waria di Tulungagung

Hasil penelitian pada komunitas APRIKOT (Apresiasi Waria dan Priawan Kota Tulungagung) menunjukkan bahwa sebagian besar anggota memiliki latar pendidikan menengah (SMA/SMK), yaitu sekitar 70% dari total 40 anggota. Sementara itu, 15% berpendidikan SMP, 10% berpendidikan SD, dan hanya 5% yang menempuh perguruan tinggi. Waria dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kesempatan untuk bekerja di bidang yang lebih stabil, seperti menjadi tenaga salon profesional, pengajar kecantikan, pekerja administrasi, atau bahkan aktivis sosial. Sementara waria dengan tingkat pendidikan rendah lebih sering bekerja di sektor informal yang tidak tetap seperti pekerja seks, pengamen, atau buruh harian. Dengan demikian, terdapat keterkaitan langsung antara pendidikan dan pekerjaan yang dijalani, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan berpenghasilan lebih baik. Keterbatasan pendidikan yang dialami waria bukan semata-mata karena faktor ekonomi, tetapi juga karena identitas gender mereka yang berbeda dari norma sosial umum. (Amila & Abidin, 2024)

Hal ini memunculkan dua bentuk utama kesenjangan sosial yang menjadi pola dominan dalam kehidupan mereka, yaitu:

1. Akses pendidikan dibatasi karena identitas gender.

Data dari komunitas APRIKOT menunjukkan bahwa sekitar 70% anggota komunitas hanya berpendidikan SMP hingga SMA, bahkan sebagian tidak menamatkan pendidikan dasar. Hal ini bukan disebabkan oleh rendahnya motivasi belajar, melainkan karena identitas mereka sebagai waria membatasi kenyamanan dan kesempatan di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan, banyak waria yang sejak bersekolah tetap berpenampilan seperti laki - laki pada umumnya. Namun banyak dari mereka yang enggan berteman dengan laki - laki dan bahkan tidak menyukai permainan laki - laki. Sehingga hal tersebut menimbulkan sindiran, ejekan bahkan

pengucilan. Situasi tersebut menimbulkan tekanan psikologis dan rasa tidak nyaman, sehingga sebagian memilih berhenti sekolah sebelum menamatkan jenjang pendidikan menengah.

Diskriminasi dalam dunia pendidikan tidak selalu terlihat dalam bentuk kebijakan yang langsung menyingkirkan kelompok waria, namun lebih sering berasal dari sikap keluarga dan masyarakat yang memandang identitas mereka sebagai penyimpangan. Seperti diungkapkan oleh Mami Josh, banyak yang berhenti sekolah bukan karena dikeluarkan oleh institusi, melainkan karena kurangnya dukungan dari pihak keluarga. Sebagian besar mengaku pernah mendapat penolakan secara verbal. Kondisi ini menyebabkan banyak waria kehilangan motivasi untuk melanjutkan sekolah karena merasa tidak memiliki tempat untuk kembali mendapatkan dukungan emosional. Hal ini mengindikasikan bahwa pengucilan sosial bermula dari lingkungan terdekat, yang pada akhirnya membatasi akses individu terhadap pendidikan.

Para informan sepakat bahwa pendidikan itu penting. Beberapa dari mereka juga ingin mendapatkan bantuan melalui komunitas, tapi kenyataannya tidak ada kegiatan pendidikan non-formal yang berjalan secara rutin dan terstruktur di lingkungan komunitas mereka. Program-program seperti kejar paket C, pelatihan keterampilan, atau bimbingan belajar hanya ada dalam skala kecil dan sifatnya tidak berkelanjutan. Bahkan kegiatan yang ada pun tidak dirancang secara spesifik untuk kelompok waria, sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Keterbatasan akses pendidikan yang dialami waria di Tulungagung sebagaimana tergambar di atas menunjukkan bahwa diskriminasi tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga mengakar dalam struktur sosial paling dasar, yakni keluarga dan lingkungan pendidikan.

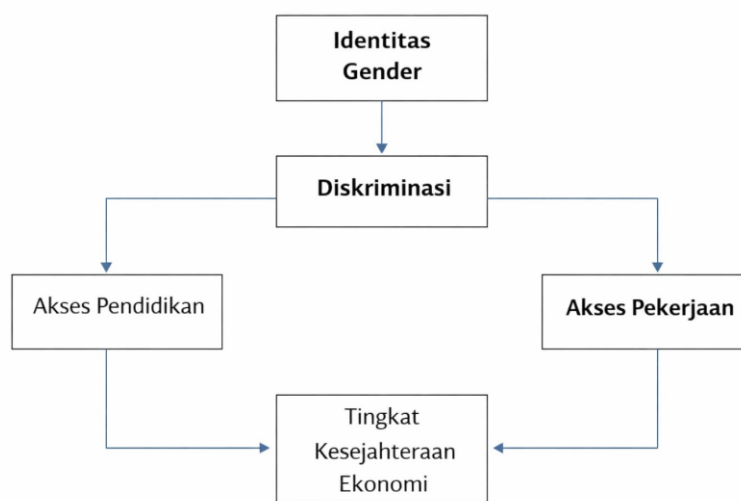
2. Akses Memilih Pekerjaan Dibatasi karena identitas gender

Waria di Tulungagung juga menghadapi hambatan yang serius dalam hal akses terhadap dunia kerja, terutama di sektor formal. Identitas gender yang tidak sesuai dengan norma sosial menyebabkan mereka kerap kali tidak diterima atau didiskriminasi dalam proses rekrutmen dan lingkungan kerja. Terdapat beberapa informan seperti Mami Josh, Merry, dan Kiky berhasil menembus sektor formal karena latar belakang pendidikan sarjana. Mayoritas waria lainnya seperti Tria dan Rere harus menerima realitas kerja di sektor informal, seperti menjadi penjaga warkop, karyawan salon hingga menjadi pekerja seks. Kondisi ini menggambarkan bahwa akses terhadap pekerjaan bagi waria masih sangat bergantung pada tingkat pendidikan dan penerimaan sosial terhadap identitas gender mereka.

Salah satu faktor utama pembatasan ini adalah stigma masyarakat yang masih memandang waria sebagai kelompok yang “tidak pantas” bekerja di ruang publik formal. Banyak perusahaan atau lembaga pemerintahan di Tulungagung enggan menerima karyawan waria karena khawatir terhadap “citra institusi” dan tanggapan masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa proses diskriminasi bukan semata berasal dari kemampuan individu, tetapi merupakan hasil dari konstruksi sosial yang menolak keberagaman identitas gender di dunia kerja. (Dalimoenthe, 2021) Hanya sekitar 10% yang berhasil bekerja di sektor formal, itupun dengan risiko sosial yang tinggi. Artinya 90% waria di Tulungagung masih di sektor informal yang memiliki tingkat pendapatan rendah dan tidak menjamin kestabilan ekonomi.

Sebagian besar dari mereka memperoleh pendapatan antara Rp1.200.000 hingga Rp1.800.000 per bulan, jauh di bawah UMR Kabupaten Tulungagung tahun 2025 sebesar

Rp2.295.000. Fakta ini menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap identitas gender tidak hanya berdampak pada kesempatan kerja, tetapi juga secara langsung memengaruhi kesejahteraan ekonomi kelompok waria. Dengan demikian, keterbatasan akses memilih pekerjaan bagi waria bukan sekadar persoalan pilihan pribadi, melainkan hasil dari struktur sosial yang menolak perbedaan identitas gender. Diskriminasi di dunia kerja memperkuat kesenjangan sosial-ekonomi dan membatasi ruang bagi kelompok ini. (Azzahra, Sitinjak, Kusuma, Sherlyana, & Susilo, 2025) Oleh karena itu, upaya mewujudkan keadilan bagi waria di Tulungagung perlu dimulai dari pengakuan hak mereka untuk memperoleh kesempatan kerja yang setara tanpa diskriminasi berbasis gender. Berikut bentuk kesenjangan social yang saling berkaitan dan membentuk pola berulang :



Gambar 1 Pola bentuk kesenjangan social pada waria

Pola ini menjelaskan bahwa diskriminasi yang dialami waria tidak berhenti pada satu dimensi sosial saja, melainkan berulang dan saling memperkuat antar sektor kehidupan. Terlihat dari gambar diatas menunjukkan adanya rantai sebab-akibat yang berawal dari identitas gender non-normatif, kemudian memunculkan diskriminasi sosial yang berdampak pada terbatasnya akses pendidikan, keterbatasan pilihan pekerjaan, hingga akhirnya menghasilkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang rendah. Pola ini memperlihatkan bahwa kesenjangan sosial-ekonomi yang dialami oleh waria tidak terjadi secara terpisah, melainkan merupakan proses yang saling berkelindan dan memperkuat satu sama lain. Identitas gender menjadi titik awal munculnya hambatan struktural bagi kelompok waria.

Dalam masyarakat yang masih berpegang kuat pada nilai heteronormatif, keberadaan identitas gender yang berbeda dianggap menyimpang dari norma sosial yang berlaku. Akibatnya, sejak usia sekolah, banyak waria mengalami tekanan psikologis, ejekan, dan pengucilan dari lingkungan sekitar. Kondisi ini membuat sebagian besar dari mereka merasa tidak nyaman di sekolah dan akhirnya memilih berhenti sebelum menyelesaikan pendidikan formal. Keterbatasan dalam memperoleh pendidikan formal berdampak langsung pada hilangnya kesempatan bagi waria untuk membangun human capital atau modal manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Gary

Becker yakni pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan ekonomi individu. (Weiss, 2015)

Dalam kasus waria di Tulungagung, proses pembentukan modal manusia berjalan dengan semestinya. Mereka yang memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi cenderung mampu menembus sektor pekerjaan formal seperti karyawan salon profesional, pegawai administrasi, atau pekerja di lembaga swasta. Sementara itu, waria dengan tingkat pendidikan rendah lebih banyak terjebak di sektor informal yang berpenghasilan tidak tetap, seperti pekerja salon keliling, pengamen, atau pekerja seks. (Azzahra et al., 2025) Namun, dalam konteks kelompok waria, hasil investasi pendidikan ini tidak sepenuhnya memberikan manfaat yang setara, sebab faktor sosial dan diskriminasi masih menjadi penghalang utama dalam pengakuan kemampuan mereka di dunia kerja.

Selain itu, faktor letak geografis tempat tinggal komunitas waria turut memperkuat pola kesenjangan yang terjadi. Komunitas APRIKOT, misalnya, sebagian besar menetap di wilayah yang relatif terpencil dan terpisah dari pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Letak tempat tinggal yang tersembunyi ini membuat mereka semakin terpinggirkan, tidak hanya secara sosial tetapi juga secara ekonomi. Akses terhadap informasi, pelatihan keterampilan, serta program pemberdayaan yang biasanya diselenggarakan di pusat kota menjadi sangat terbatas. Hal ini memperlambat proses pembentukan modal manusia karena peluang untuk meningkatkan kapasitas diri dan memperluas jaringan sosial-ekonomi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Pola diskriminasi yang dimulai dari sekolah hingga dunia kerja menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Selama stigma sosial terhadap identitas gender non-normatif masih kuat, maka akses pendidikan yang setara dan kesempatan ekonomi yang adil tidak akan tercapai.

D. Peran Komunitas Dalam Mendukung dan Memperjuangkan Hak-Hak Sosial dan Ekonomi Waria di Tulungagung

Komunitas APRIKOT memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan para waria di Tulungagung. Tidak hanya sebagai tempat berkumpul, komunitas ini juga membantu anggotanya dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari diskriminasi, tekanan keluarga, kesulitan ekonomi, hingga keterbatasan pendidikan. Di tengah masyarakat yang masih memandang waria dengan stigma dan prasangka, APRIKOT hadir sebagai ruang aman untuk saling mendukung dan menguatkan. Fungsi komunitas ini bisa dipahami melalui perspektif fungsionalisme dalam sosiologi, di mana setiap bagian dalam masyarakat memiliki peran untuk menjaga keseimbangan sosial. (Dalimoenthe, 2021) APRIKOT menjalankan fungsi tersebut dengan cara membantu anggotanya bertahan di tengah tekanan sosial. Lewat pendekatan kekeluargaan, APRIKOT membantu mereka yang sedang mengalami masalah, baik berupa tekanan mental, sakit, hingga kesulitan ekonomi.

APRIKOT juga aktif membantu anggotanya mengembangkan keterampilan. Komunitas ini sering bekerja sama dengan dinas kesehatan, KPA, atau LSM untuk memberikan pelatihan seperti menjahit, tata rias, hingga kejar paket pendidikan. Tujuannya agar para waria punya bekal keterampilan yang bisa dipakai untuk bekerja atau membuka usaha sendiri, apalagi banyak dari mereka yang tidak sempat melanjutkan sekolah karena alasan ekonomi atau tekanan keluarga. Seperti yang dialami Rere dan Tria, yang tidak bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena harus

bekerja lebih dulu untuk membantu keluarga. Secara tidak langsung, APRIKOT berperan sebagai agen sosial yang mengupayakan perubahan sosial melalui pemberdayaan komunitas waria. Beberapa waria yang memiliki pendidikan lebih tinggi dan keterampilan yang cukup bahkan berhasil masuk ke pekerjaan formal, seperti Mami Josh yang bekerja di bidang kesehatan, Merry yang menjadi perawat, dan Kiky yang bekerja di perhotelan.

Menurut Mami Josh, hal ini bisa terjadi karena mereka punya latar pendidikan yang memadai dan didukung oleh jaringan pertemanan yang membantu mereka mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan, keterampilan, dan relasi sosial adalah hal penting bagi waria untuk bisa menembus dunia kerja formal. APRIKOT dinilai sebagai perantara yang menjebatani individu dengan struktur sosial yang lebih luas. Hal ini juga sejalan dengan teori Human Capital dari Gary Becker, yang menjelaskan bahwa investasi pada pendidikan, pelatihan, dan keterampilan akan meningkatkan kemampuan seseorang dalam bekerja dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. (Rouse, 2010) Dalam hal ini, komunitas APRIKOT membantu anggotanya meningkatkan “modal manusia” dengan cara memberi pelatihan dan memperluas jaringan sosial.

Meskipun demikian, APRIKOT juga menghadapi tantangan. Tidak semua anggota bisa diajak bekerja sama atau mau mengikuti pelatihan. Ada yang sudah merasa nyaman dengan pekerjaan yang sekarang, meskipun itu pekerjaan di sektor informal seperti salon atau bahkan menjadi pekerja seks. Selain itu, diskriminasi dari masyarakat dan institusi formal masih tetap terasa, meski bentuknya tidak selalu keras atau terbuka. Secara keseluruhan, keberadaan APRIKOT sangat membantu para waria di Tulungagung untuk bertahan dan berkembang di tengah keterbatasan yang ada. Komunitas ini tidak hanya memberikan tempat aman untuk berkumpul, tetapi juga membuka peluang bagi anggotanya untuk belajar, berusaha, dan memperjuangkan hidup yang lebih baik. Dengan demikian peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui dukungan komunitas dapat menjadi strategi penting dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan sosial-ekonomi yang dialami komunitas waria di Tulungagung merupakan hasil dari kombinasi antara faktor struktural dan kultural. Akses yang terbatas terhadap pendidikan formal menyebabkan banyak dari mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki sektor kerja formal. Hal ini diperburuk oleh diskriminasi berbasis gender non-normatif, baik di lingkungan keluarga, institusi, maupun masyarakat luas. Akibatnya, sebagian besar waria menggantungkan hidupnya pada sektor informal yang tidak stabil dan rawan eksploitasi. Komunitas APRIKOT memiliki peran penting sebagai agen pemberdayaan sosial dan ekonomi. Melalui pelatihan keterampilan, pendampingan psikologis, dan kerja sama lintas lembaga, komunitas ini menjadi ruang aman dan sarana peningkatan kapasitas bagi anggotanya. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan karena diskriminasi sistemik belum sepenuhnya hilang, dan sebagian anggota belum sepenuhnya dapat mengakses peluang yang ditawarkan. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa integrasi sosial komunitas waria masih bersifat terbatas. Tempat tinggal yang

tertutup, minimnya interaksi sosial, dan keterbatasan ruang gerak di ruang publik memperlihatkan adanya eksklusi sosial yang terselubung. Dari segi ekonomi, pendapatan yang diperoleh 68 dari sektor informal cenderung fluktuatif dan tidak menjamin keberlanjutan hidup. Ini menunjukkan bahwa rendahnya investasi dalam human capital menyebabkan komunitas waria tetap berada dalam lingkaran kemiskinan dan keterpinggiran. Dengan demikian, peningkatan akses pendidikan, pelatihan kerja, dan penghapusan diskriminasi di berbagai sektor menjadi prasyarat penting untuk membangun kehidupan yang lebih setara bagi komunitas waria di Tulungagung.

REFERENSI

- Alfaris, M. R. (2018). Eksistensi Diri Waria Dalam Kehidupan Sosial Di Tengah Masyarakat Kota (Fenomenologi Tentang Eksistensi Diri Waria Urbanisasi di Kota Malang). *Widya Yuridika*, 1(1), 234795.
- Amila, A., & Abidin, M. Z. (2024). Transgender Survival Strategy Amidst Discrimination to Meet Economic Needs in Jayapura City. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 5(1), 51–68.
- Ashari, N. (2021). Konsep Diri Waria (Fenomena Waria di Akademi Pariwisata Makassar). *JIVA: Journal of Behaviour and Mental Health*, 2(2).
- Azzahra, A. S., Sitingjak, N., Kusuma, F. A., Sherlyana, N. P., & Susilo, S. (2025). Stigma Dan Realita: Diskriminasi Waria Di Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling*, 2(4), 1355–1364.
- Dalimoenthe, I. (2021). *Sosiologi Gender*. Bumi Aksara.
- Lestari, D. A., Apip, A., & Hikmawan, M. D. (2018). *Subjek Marginal: Waria dalam Memperjuangkan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Serang Banten (Fenomena Keberadaan Waria Kota Serang)*.
- Nurusshalikhah, D. I. (2016). *Diskriminasi Hak Kerja terhadap Kaum Transgender (Studi Kasus: Tiga Transgender di Jakarta)*. Universitas Negeri Jakarta.
- Pamungkas, & B. (2021). No Title. *IDNtimes*.
- Rouse, W. B. (2010). Human Capital Economics. In *The Economics of Human Systems Integration: Valuation of Investments in People's Training and Education, Safety and Health, and Work Productivity* (pp. 57–68).
- Tanjung, F. (2020). *Adaptasi Waria: Studi Kasus Komunitas Waria di Kabupaten Pangkep*.
- Vahsyeli, S., Yusnaini, Y., & Lidya, E. (2020). Tekanan Sosial Kaum Waria di Kota Palembang. *Jurnal Media Sosiologi*, 23(2), 107–117.
- Weiss, Y. (2015). Gary Becker on Human Capital. *Journal of Demographic Economics*, 81(1), 27–31.